



**INFORMASI HARIAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
KABUPATEN TEGAL**

Kamis, 11 Juni 2020

Kami Laporkan data per Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020 pukul 18.00 WIB, berdasarkan Sistem Informasi Pantauan COVID-19 Kabupaten Tegal (covid19.tegalkab.go.id) dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tegal, terdapat :

- I. Pelaku Perjalanan : 46.351 orang
- II. Orang Tanpa Gejala (OTG) : 228 orang
- III. Orang Dalam Pantauan (ODP) : 1.276 orang

- IV. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 235 orang dengan rincian :
 1. PDP Sembuh : 182 orang
 2. PDP Dirawat : 28 orang
 3. PDP Meninggal : 25 orang (Hasil SWAB Belum Keluar)Keterangan :
 4. PDP Baru : 1 orang
 5. PDP dari Luar Wilayah : 0 orang

- V. Positif Covid-19 berjumlah 21 orang dengan rincian :
 1. Sembuh = 12 orang

 2. Dirawat = 5 orang
 - RSUD Dr. Soeselo : 1 orang
 - RSUD Suradadi : 0 orang
 - RSUD Kardinah : 0 orang
 - RS Mitra Siaga : 0 orang
 - RS Harapan Sehat : 4 orang
 - PKU Muhammadiyah : 0 orang

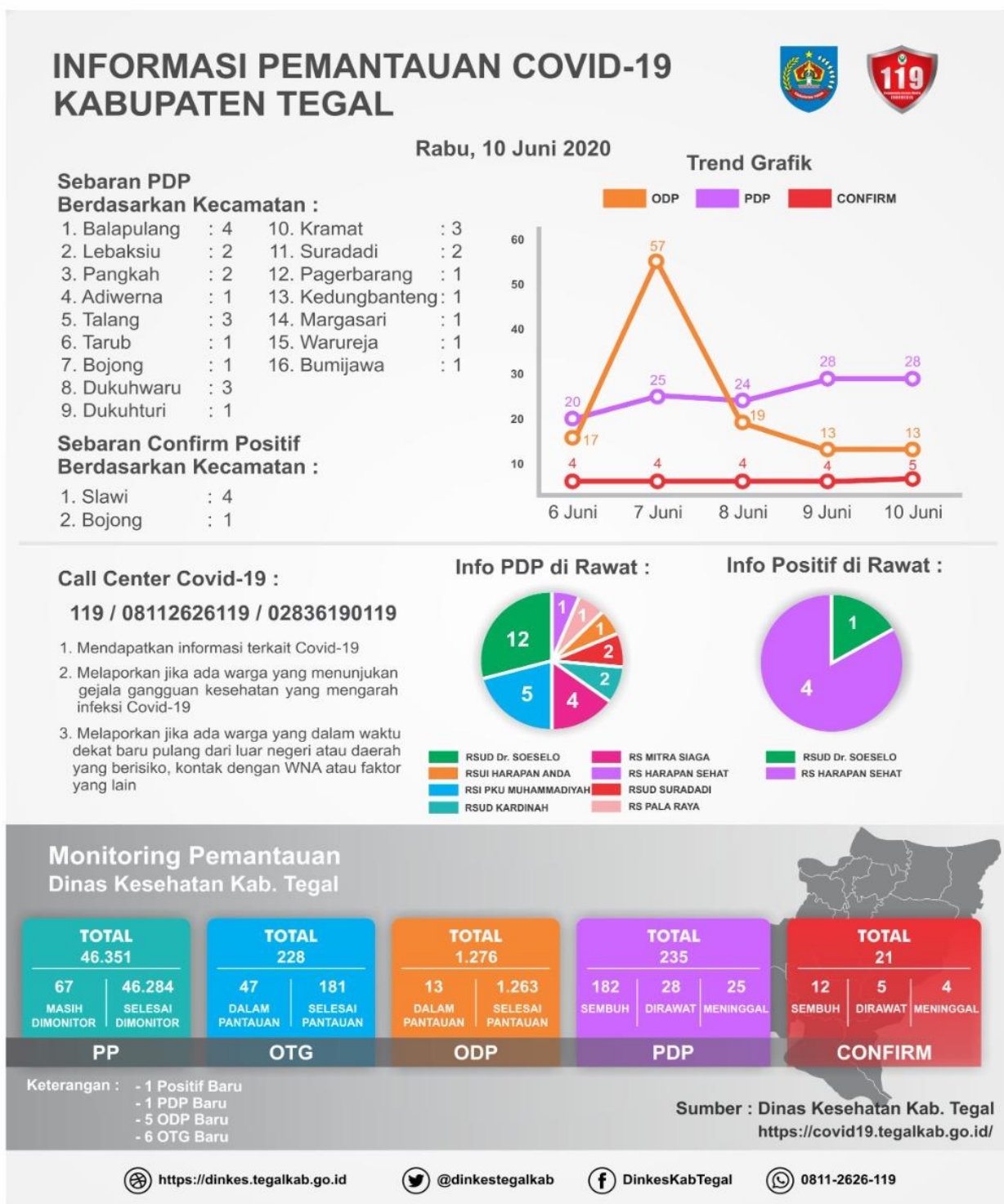
 3. Meninggal : 4 orang

Keterangan :

- PP (Pelaku Perjalanan) : Kontak wilayah terjangkit tapi tidak ada gejala
OTG (Orang Tanpa Gejala) : Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
ODP : Orang Dalam Pemantauan
PDP : Pasien Dalam Pengawasan

INFORMASI PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) DIRAWAT :

NO	RUMAH SAKIT	PDP
1	RSUD Dr. SOESELO	12
2	RSUD Suradadi	2
3	RSU Islam Harapan Anda	1
4	RS Mitra Siaga	4
5	RS Kardinah	2
6	RS PKU Muhammadiyah	5
7	RS Harapan Sehat	1
8	RS Pala Raya	1
TOTAL		28



Update Pemantauan Covid-19 Rabu, 10 Juni 2020.

Positif Baru : 1

PDP Baru : 1

PDP Sembuh : 1

ODP Baru : 5

ODP Selesai Pemantauan : 5

OTG Baru : 6

Terpantau terjadi penambahan 1 kasus confirm positif asal Ds. Kedawung Kec. Bojong. Dan 1 PDP baru serta 6 OTG baru.

GUGUS TUGAS UNGKAP 5 TAHAPAN PROTOKOL MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar produktif tapi tetap aman dari virus Corona (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pun menyebut ada 5 tahapan protokol yang harus diperhatikan untuk menuju masyarakat produktif dan aman Corona, apa saja?



Foto Prof Wiku Adisasmito: dok. BNPB

"Saya akan membahas tahapan protokol menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, seperti yang diketahui untuk mengaktifkan sektor ekonomi, tidak bisa serta merta dibuka langsung, tapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam menuju masyarakat produktif dan aman COVID, maka terdapat 5 tahapan yang saling berkaitan dalam melaksanakan protokol masyarakat produktif dan aman COVID," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, saat konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Senin (8/6/2020).

Ada 5 tahapan menuju masyarakat produktif dan aman COVID. Tahapan pertama adalah prakondisi, yakni memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat terkait pencegahan dan penanganan Corona.

"Tahapan pertama prakondisi, tahapan awal yang dilakukan tiap daerah adalah melakukan prakondisi dengan memberikan informasi holistik jelas, dan mudah dipahami masyarakat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 melalui sosialisasi komunikasi publik yang efektif," jelas Wiku.

Kedua adalah tahap timing, tahapan ini yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah bisa dimulai aktivitas sosial ekonominya. Namun, dengan memperhatikan sejumlah data.

"Tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonomi dengan perhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan protokol kesehatan, kesiapan organisasi manajemen di daerah, serta memastikan fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.

Tahapan selanjutnya adalah prioritas, yakni tahapan untuk memilih kesiapan sektor mana yang bisa dibuka secara bertahap. Selanjutnya, ada tahapan yang penting itu tahapan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tidak lupa terakhir adalah tahapan monitoring dan evaluasi aktivitas sosial ekonomi.

"Tahapan prioritas, tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dibolehkan kegiatan sosial ekonominya secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat dilanjutkan. Keempat tahapan koordinasi pusat dan daerah tahapan ini penting dimana

terjadi konsultasi timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan," jelasnya.

"Kelima tahap monitoring evaluasi, tahapan pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan dari pemulihan aktivitas sosial ekonomi," tambahnya.

Masyarakat, kata Wiku, juga perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona. Adaptasi itu misalkan, merubah perilaku untuk lebih sehat dan lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Masyarakat perlu tips supaya tidak terpapar COVID, pertama yang dilakukan perubahan perilaku, hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, dan hidup lebih taat, ketiga selalu disiplin wajibkan laksanakan protokol kesehatan. Kedua, masyarakat juga perlu tips agar tak terkapar oleh PHK, maka pertama perlu perhatikan kenaikan kasus dari setiap daerah yang berbeda-beda, kedua reaktivasi sektor kegiatan sosial ekonomi dilakukan secara bertahap sesuai risiko masing-masing daerah," tutur Wiku.

Terakhir, Wiku mengatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Wiku juga mengatakan pemerintah akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi risiko zona daerah terkait Corona secara mingguan setiap hari Senin.

"Untuk daerah zona hijau, atau tidak terdampak kami lakukan monitoring evaluasi, untuk kabupaten kota yang tak terdampak, adapun perubahan data dari 102 kabupaten kota menjadi 92 kabupaten kota, risiko rendah per tanggal 7 Juni 2020 terjadi berdasarkan evaluasi indikator kesehatan masyarakat, kami akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi resiko zona daerah secara mingguan setiap hari Senin," pungkasnya. *Sumber : detiknews.com*

DIALOG INTERAKTIF : CERDAS BERMEDIA DI MASA NEW NORMAL

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Fuad Hidayat mengatakan dalam menghadapi New Normal ini masyarakat harus siap menerima perubahan tatanan perubahan perilaku kehidupan baru dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Senantiasa menggunakan cara-cara atau wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, perilaku hidup sehat dan bersih dan membiasakan dengan mendisiplinkan diri untuk *recovery* kehidupan dalam segala hal.



Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah pada dialog interaktif di LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi FM Rabu sore (10/06/10). Talkshow dengan thema “Cerdas Bermedia Dimasa New Normal” yang dipandu hoost Bung TW juga dihadiri Wakil Ketua Komisioner dan Kordinator Bidang Penataan Infra Struktur KPID Provinsi Jawa Tengah Asep Cuwantoro dan Koordinator Bidang

Pelayanan Perizinan Setiawan Hendra Kelana.

Lebih lanjut Fuad Hidayat mengatakan, tatanan kehidupan baru sesuai protocol kesehatan itu bertujuan agar masyarakat tetap dapat bekerja, berusaha dan beraktifitas tetapi tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Fuad Hidayat meminta kepada lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, agar menyampaikan data dan informasi yang valid dan otentik . Sebab masyarakat membutuhkan informasi dan data-data yang otentik, valid dan berdasarkan sumber sumber yang jelas agar dapat

dijadikan referensi bagi masyarakat, dan bukan merupakan informasi yang Hoaks sehingga menyesatkan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai saluran saluran resmi baik melalui DPRD maupun Pemprov yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang menginginkan informasi yang benar.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Setiawan Hendra Kelana mengatakan sebagai upaya menyikapi penyebaran wabah virus corona/covid-19 dan menuju tatanan kehidupan baru atau New Normal, KPID Jawa Tengah meminta keterlibatan dan kepedulian lembaga penyiaran dalam penyampaian informasi penting yang berkaitan dengan wabah Pandemi Covid 19. Informasi yang benar dan massif diperlukan demi menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Untuk itu KPID Jawa Tengah menganggap perlu adanya sosialisasi kepada Lembaga Penyiaran dan khalayak masyarakat.

Terkait status New Normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, media mempunyai peran yang sangat besar dan strategis dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat beraktifitas dan bersosialisasi secara aman.

Media Penyiaran Radio dan Televisi harus memposisikan diri sebagai penyambung antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, agar masyarakat tidak kehilangan informasi dan salah dalam mengambil tindakan dalam menghadapi New Normal yang sebenarnya harus dilakukan.

Pada masa Pandemi Covid 19 rating penyiaran Radio dan Televisi mengalami kenaikan yang signifikan ,disebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan informasi yang mudah dijangkau.

KPID Provinsi Jawa Tengah berharap lembaga penyiaran dapat berkontribusi dalam upaya membantu mensosialisasikan upaya pencegahan pandemi Covid-19. “Juga menyiarkan informasi yang mendidik ,mencerdaskan dan benar dengan memastikan siapa sumber informasinya,” tegas Setiawan Hendra Kelana

Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah Asep Cuwantoro menambahkan, bahwa pihaknya selalu mendorong lembaga lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah agar selalu proaktif dalam memberikan informasi dan menjadi media yang dapat membangkitkan gairah, memberikan motivasi, pencerahan dan menumbuhkan harapan bahwa masyarakat. Sehingga masyarakat tetap dapat survive dan dapat melawan Covid 19 diantaranya dengan selalu memperoleh hiburan dari siaran radio dan televisi sebagai salah satu alternative. “Dengan terhibur dan bahagia dapat menjadi penyembuh karena dengan selalu riang gembira, imun tubuh dan daya tahan tubuh juga kuat”, tegas Asep Cuwantoro.

Direktur Utama LPPL Slawi FM Kusnianto menyatakan senang dan sangat terkesan atas kunjungan Wakil Ketua Komisi A DPRD dan Komisioner KPID Jawa Tengah serta siap menjalankan harapan mereka agar lembaga penyiaran dapat memberikan informasi dan data yang valid serta otentik berdasarkan sumber yang jelas sekaligus menghibur masyarakat. Hal ini sesuai dengan tagline kami “Slawi FM : Radio Informasi dan Hiburan”, pungkasnya

Diakhir kunjungannya, Komisioner KPID dan juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah melakukan rekaman *take voice* pembuatan Iklan Layan Masyarakat di studio produksi Radio Slawi FM. *Sumber : SlawifM.Hendra LD.*

HINDARI KEBOCORAN KEUANGAN E-RETRIBUSI PASAR DITERAPKAN



Slawi- Untuk mengurangi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Tegal akan menerapkan sistem e-Retribusi Pasar. Saat ini Dinas Dagkop (UKM) Kabupaten Tegal *Launching*/peluncuran E-Retribusi dengan penggunaan pembayaran menggunakan Kartu di 2 pasar tradisional yakni Pasar Pededan dan Pasar Kupu. Sistem ini merupakan yang pertama di Kabupaten Tegal .

Demikian disampaikan Dra Suspriyanti MM Kepala Dinas Dagkop dan UKM Penerapan E-Retribusi Bank Jateng memberikan bantuan berupa M Vost sebanyak 3 Unit, 2 unit untuk dipasar Pededan 1 unit dipasar kupu. dan Aplikasinya bekerjasama dengan AMM Solo , E- retribusi di pasar bisa lebih transparan dan aman dari kebocoran.

Menurut Kepala Dagkop dan UKM , dasar pelaksanaan E-retribusi pasar adalah SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kab/Kota.

Pemerintah Kabupaten Tegal menerapkan sistem e-Retribusi, nantinya menjadi terobosan untuk mengurangi timbulnya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai proses awal, masyarakat perlu diberitahu bahwa di Pasar Pededan akan dijadikan percontohan dan akan diterapkan di 25 pasar , ditambah 1 pasar hewan yang ada di desa Curug kecamatan Pangkah. untuk pasar pededan jumlah pedagang ada 761 orang sedangkan pasar kupu sebanyak 132 orang, oleh karena itu Dinas Dagkop Ukm mengambil 2 pasar sebagai percontohan yaitu pasar pededan yang jumlah pedaganya banyak dan pasar kupu yang jumlah pedaganya lebih sedikit. Terangnya

Launching yang digelar dipasar Pededan dihadiri oleh Bupati Tegal didampingi Wakil Bupati Sabilillah Ardie, Kepala OPD terkait, Kepala Dinas Dagkop UKM Dra Suspriyanti MM, Forkampicam dan Pengurus paguyuban pedagang Pasar pededan dan Kupu Rabu 10/6/2020.

Bupati Tegal Umi Azizah menegaskan, Penerapan E-Retribusi ini para pedagang segera menyesuaikan diri untuk membiasakan membayar retribusi secara Elektronik. Sistem Pembayaran E-Retribusi akan diperluas penerapannya diseluruh pasar yang ada dikabupaten Tegal merupakan salah satu inovasi dari Dinas Dagkop UKM untuk mempermudah pedagang dalam membayar retribusi yang selama ini pembayarannya menggunakan secara manual sekarang cukup menggunakan kartu.

Kemudian diterapkan E-retribusi ini juga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 karena pungutan retribusi sudah tidak menggunakan uang secara langsung dan uang sangat rentan penyebaran Covid 19. Tegasnya

" Umi mengatakan nantinya para pedagang yang mempunyai kios di Pasar Pepedan akan disediakan Alat untuk membayar E-retribusi. Adanya E-Retribusi bisa meminimalkan kebocoran keuangan. "Dengan sistem pembayaran elektronik retribusi ini akan bisa menekan unsur kebocoran PAD.

Pedagang tinggal menempelkan kartu untuk membayar retribusi pasar, uangnya langsung masuk ke rekening PAD yang bekerja sama dengan Bank Jateng Jika E-Retribusi di Pasar Pepedan dan Kupu berhasil, akan diterapkan di seluruh pasar se-Kabupaten Tegal." "tuturnya.(Diskominfo Kab.Tegal/Ew).

PEMKAB TEGAL SIAPKAN SKENARIO KEGIATAN KEAGAMAAN AMAN COVID 19 DI ERA NEW NORMAL



Slawi – Mendasari surat edaran menteri Agama Republik Indonesia nomor SE. 15 Tahun 2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang panduan penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid 19 di masa pandemi di bidang keagamaan, penyelenggaran kegiatan di rumah ibadah dalam mendukung fungsionolisasi rumah ibadah pada masa pandemi Covid 19, Pemkab Tegal menggelar Rapat koordinasi selasa 9 Juni 2020.

Rakor yang berlangsung di ruang rapat Bupati Tegal dihadiri Bupati Tegal Umi Azizah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hendadi Setiaji M.Kes , Staf Ahli Bupati, Kepala Depag Tegal, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Kepala OPD Terkait, dan semua ormas keagamaan yang ada diKabupaten Tegal.

Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan, Adaptasi/penyesuain baru terhadap tatanan normal baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Tegal yang produktif dan aman Covid-19. Penyesuaian baru sistem penyelenggaraan kegiatan rumah ibadah di era New Normal untuk penyelenggaraan secara berjamah ketentuannya dilaksanakan secara ketat, pengurus rumah ibadah harus melaksanakan protokol keehatan dan harus ada surat keterangan aman Covid 19 dari ketua Gugus Tugas Kabupaten/kecamatan.

Pemkab Tegal juga akan melakukan pemantauan kegiatan di rumah ibadah sekaligus pemantauan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang harus dilakukan pengurus rumah ibadah dan umat beragama. Kemudian melakukan sampling rapid test disemua rumah ibadah dengan hasil tidak ada yg reaktif. "Tantangan dalam persiapan new normal yakni kesadaran masyarakat memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sementara menjaga jarak masih kurang disiplin. Dan rumah ibadah belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19" ujar Umi

Kata Umi , Kegiatan pertemuan masyarakat dirumah ibadah harus dipastikan semua peserta yang hadir dipastikan kondisinya sehat dan negative Covid 19. Batasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang dan pertemuanya harus dilaksanakan seefesien mungkin.

Yang harus diperhatikan oleh pengurus rumah ibadah dan umat tentang sistem kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam tatanan normal baru adalah segera menyesuaikan sistem Kegiatan keagamaan rumah ibadah dalam tatanan Normal baru, mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran Covid. Tegas Umi

Ketentuan penyesuaian baru Penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah untuk dapat dijalankan seluruh pengurus rumah ibadah dan umat beragama pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.(Diskominfo Kab.Tegal)

STRATEGI PELAKSANAAN
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID19
Sesuai Arahannya Presiden Jokowi

9. Jika dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka tim Gugus Tugas Kabupaten/ Kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

8. Setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh pemerintah daerah.

7. Tahapan sosialisasi tersebut harus bisa dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh masyarakat. Karena inti keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid19 adalah kedisiplinan dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan.

6. Pengambilan keputusan harus melalui tahapan pra-kondisi yakni edukasi, sosialisasi, dan simulasi pada sektor/ bidang seperti: rumah ibadah (masjid, gereja, pura, vihara), pasar/pertokoan, transportasi umum, hotel dan restoran, perkantoran dan bidang penting lainnya.

5. Pengambilan keputusan harus melalui ForkomPimda, melibatkan segenap komponen masyarakat: pakar kedokteran (IDI), pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha dan DPRD melalui pendekatan kolaborasi PentaHelix berbasis komunitas.

4. Ketua Gugus Tugas memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/ Kota yang saat ini erada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap daerah harus memperhatikan ketentuan tentang **testing masif**, **tracing agresif** dan **isolasi ketat** serta **treatment** menyembuhkan pasien Covid19.

3. Daerah zona merah menjadi prioritas untuk bisa menjadi zona orange. Zona orange dikontrol menjadi zona kuning, dan zona hijau terus dipertahankan agar tidak menjadi zona kuning atau orange.

2. Dari analisis dan pemetaan pakar, pemerintah melakukan kategori sesuai tingkat risiko di tiap daerah berdasarkan warna sbb:
● Zona Hijau: belum terdampak
● Zona Kuning: tingkat risiko rendah
● Zona Orange: tingkat risiko sedang
● Zona Merah: tingkat risiko tinggi.

1. Pengendalian COVID19 harus berbasis data dan fakta di lapangan. Karena itu, Gugus Tugas dalam mengambil segala putusan selalu melibatkan para pakar (*scientist*) dan berpedoman pada standar internasional.

"Gugus Tugas Pusat bersama Pemerintah Provinsi (Gugus Tugas Provinsi) akan memberikan informasi, pendampingan dan evaluasi serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan."

Ketua Gugus Tugas Covid19, **Doni Monardo**

Demikian laporan Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Penanganan Covid-19, untuk menjadikan periksa.

Terima kasih.

Kamis, 11 Juni 2020

Ttd

KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KABUPATEN TEGAL.